

STUDI LITERASI

**KARAKTERISASI BERBAGAI SISTEM PEMBIBITAN
TERNAK SAPI POTONG DI INDONESIA**



OLEH :

BRAMADA WINIAR PUTRA

**PUSAT STUDI HEWAN TROPIKA (CENTRAS)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2022**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pusat Studi Hewan Tropika (**CENTRAS**)
Kampus IPB Baranangsiang, Bogor 16128
Telepon +62 0251-8350413
Facsimile +62 0251-8350413
centras@apps.ipb.ac.id ; centras.lppmipb@gmail.com ;
ipb.centras@yahoo.com | centras.ipb.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : KARAKTERISASI BERBAGAI SISTEM PEMBIBITAN
TERNAK SAPI POTONG DI INDONESIA

Peneliti

Nama Lengkap : Bramada Winiar Putra, S.Pt., M.Si.
NIDN : 0002118005
Departemen : Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan
Nomor HP : 081227492181
Surel (e-mail) : bramadapu@apps.ipb.ac.id

Alamat : Pusat Studi Hewan Tropika (CENTRAS) LPPM IPB
Tahun : 2022

Bogor, 29 Juli 2022

Mengetahui,
Kepala Pusat Studi Hewan Tropik (CENTRAS)
LPPM IPB University



Dr. Ir. Afton Atabany, MSi
NIP. 19640521 199512 1 002

Peneliti

Bramada Winiar Putra, S.Pt., M.Si.
NIP. 19801102 200501 1 001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tujuan	1
BAB II MATERI DAN METODE	
II.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	2
II.2 Alat dan Bahan	2
II.3 Metode.....	2
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
III.1 Pembibitan Sistem Peternakan Rakyat	3
III. 3 Pembibitan Sistem Kemitraan	7
III.3 Pembibitan Bersama BUMN	9
BAB IV KESIMPULAN	
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peternakan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat memprihatinkan sampai saat ini. Pelaku usaha peternakan di Indonesia saat ini adalah peternakan rakyat yang berkontribusi sebanyak 78% dalam pemasokan sapi. Usaha peternakan sapi di Indonesia yang berfokus pada sapi potong didominasi oleh peternakan rakyat sebesar 4.204.213 orang yang menguasai lebih dari 98% ternak di Indonesia, Peternakan rakyat memiliki pola (1) Rata-rata kepemilikan ternak rendah; (2) Ternak digunakan sebagai tabungan hidup; (3) Ternak dipelihara dalam pemukiman padat penduduk dan dikandangkan di belakang rumah; (4) Terbatas lahan pemeliharaan sehingga pakan harus dicari di kawasan yang seringkali jauh dari rumah; (5) Usaha beternak dilakukan secara turun temurun; (6) Jika Tidak ada modal untuk membeli, peternak menggaduh dengan pola bagi hasil.

Peternak rakyat umumnya merupakan keluarga yang berniat untuk memelihara hewan ternak nya sebagai sebuah tabungan. Tabungan ini diharapkan dapat menambah pemasukan tambahan untuk biaya kehidupan mereka. Komoditas yang mereka himpun untuk beternak tidak lah banyak, kisarankasar sekitas 8 sampai dengan 10 ekor per ternak. Pola pemeliharaan yang dibatasi oleh lahan yang dimiliki dapat menjadi sebuah alasan mengapa hewan yang mereka pelihara hanya kisaran 8 sampai dengan 10 ekor. Pemeliharaan di pekarangan belakang rumah menjadi cara yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan beternak. Sistem yang berlaku dalam menjalan peternakan ini umumnya merupakan sistem yang dianggap baik secara turun temurun. Hal ini terjadi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan yang didapatkan oleh peternak untuk melakukan sistem yang lebih sistematis dan produktivitas yang lebih efektif.

Permasalahan krusial yang belum teratasi terutama pada aspek pembibitan yang belum dikelola secara profesional. Beberapa sistem pembibitan telah dikembangkan di Indonesia tetapi belum memberikan solusi yang signifikan dalam peningkatan populasi ternak di Indonesia.

1.2. Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk merangkum berbagai karakter sistem pembiakan sapi potong di Indonesia ditinjau dari aspek legalitas, karakteristik sistem, serta permasalahan dan alternatif solusi yang dapat diambil.

II. MATERI DAN METODE

2.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu mulai tanggal 1 Mei hingga 30 Juni 2022 dalam bentuk studi literatur di sekretariat Pusat Studi Hewan Tropika (Centras) IPB.

2.2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam pencarian literatur kali ini adalah laptop guna mencari literatur dan menulis laporan, google docs untuk media penulisan, jaringan internet yang memadai dan juga jurnal literatur. Sumber yang digunakan untuk kajian tersebut yaitu hasil penelitian dari jurnal-jurnal penelitian terkait dengan topik yang telah dipublikasikan 10 tahun terakhir dari tahun 2012-2022. Penelusuran jurnal melalui *Google Scholar* serta jurnal yang sesuai dengan kriteria, dipilih dan dianalisis.

2.3. Metode

Metode yang digunakan dalam riset ini adalah studi literatur atau penelitian kepustakaan yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian dan Internet *searching* atau pencarian secara *online* adalah pencarian dengan menggunakan komputer yang dilakukan melalui internet.

Sistem pembibitan sapi potong yang dikaji meliputi karakteristik kemitraan yaitu : Peternakan Rakyat, Sistem Kemitraan, dan Pembibitan bersama BUMN. Fokus karakteristik meliputi Legalitas yaitu dasar hukum, Karakteristik Dasar, Permasalahan dan Alternatif Solusi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pembibitan Sistem Peternakan Rakyat

Dasar Hukum

Dalam melaksanakan sentra peternakan rakyat, maka diperlukan dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini. Adapun dasar hukum yang dimaksud sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2015-

2019;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian; 10. Keputusan Menteri Pertanian RINomor 43/Kpts/PD.410/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba dan Babi Nasional.

Kapasitas Ternak Peternakan Rakyat

Berdasarkan karakteristiknya menurut Permentan No. 54 Tahun 2006:

1. Skala usaha kecil. Biasanya peternakan rakyat memelihara sapi potong di kisaran 1-4 ekor per rumah tangga peternak.
2. Manajemen sederhana. Hal ini terjadi karena keterbatasan relatif atas pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan usaha ternak sapi.
3. Pemanfaatan teknologi seadanya. Tata laksana beternak diperoleh secara turun temurun tanpa eksplorasi detail seiring kemajuan teknologi.
4. Lokasi tidak terkonsentrasi, dan
5. Belum menerapkan sistem dan usaha agribisnis.

Jumlah induk sapi yang umum dilakukan pada rumah tangga peternak sapi adalah sekitar 2 ekor pada lahan usaha rata-rata 0,22 ha dan 8 ekor pada lahan usaha 2 hektar (Widayati 2012). Rata-rata petani yang memiliki lahan kebun kelapa seluas 1-4 ha, dengan jenis kelapa varietas kelapa dalam yang berumur di atas 20 tahun dan kepemilikan ternak rata-rata sebanyak 1-10 ekor, jenis sapi potong yang dipelihara umumnya adalah jenis sapi Bali.

Sistem yang Berjalan di Peternakan Rakyat

Sistem perkandangan yang berjalan pada peternakan rakyat atas sistem intensif, ekstensif dan semi intensif, yang disesuaikan dengan jenis ternak yang dternakan. Sistem intensif merupakan sistem pemeliharaan dengan cara ternak dikandangan sepanjang waktu dengan pakan dan air diatur oleh peternak. Sedangkan sistem ekstensif adalah sistem peternakan dengan cara membebaskan ternak berkeliaran di padang rumput dan makan apapun yang ada. Untuk sistem semi intensif adalah kombinasi dari sistem intensif dan ekstensif (Fuah *et al.* 2021).

Sistem pemeliharaan sendiri pada setiap daerah dan jenis ternaknya berbeda-beda. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi dari wilayah sekitar peternakan. Biasanya para peternak rakyat yang memiliki lahan hijauan yang luas menggunakan

sistem ekstensif maupun semi intensif, sedangkan jika peternakan rakyat tersebut berada di daerah padat penduduk maka sistem pemeliharaan yang digunakan biasanya adalah sistem intensif.

Sistem kemitraan usaha peternakan sapi potong diantaranya ialah sistem gaduhan. Sistem gaduhan merupakan salah satu sistem kemitraan usaha peternakan dengan pola bagi hasil (profit sharing), yaitu merupakan hubungan kemitraan antar-peternak, atau antara peternak sebagai pelaksana yang menjalankan usaha budi daya yang dibiayai atau dimiliki oleh perusahaan peternakan dan/atau perusahaan di bidang lain. Sistem gaduhan berpotensi meningkatkan produktivitas ternak lokal guna menekan impor sapi bakalan. Kondisi demikian sebagai salah satu upaya pengembangan usaha ternak sapi potong skala rumah tangga. Kemitraan usaha peternakan dibentuk karena lemahnya peternak terhadap sumber daya, sebab sumber daya memiliki peran penting terhadap keberlanjutan usaha ternak dan pengembangan usaha ternak. Sumber daya usaha ternak antara lain meliputi sumber daya finansial, sumber daya teknologi, sumber daya fisik, sumber daya ekonomi, sumber daya lingkungan, dan sumber daya sosia. Berbagai sumber daya tersebut berperan penting dalam pengembangan usaha ternak. Semakin besar akses peternak terhadap sumber daya, maka peluang pengembangan usaha ternak semakin besar. Kondisi demikian merupakan salah satu motivasi peternak melakukan sistem gaduhan di Desa Bedadung. Salah satu faktor pendorong produktivitas sistem gaduhan ialah adanya upaya pemberian bonus "uang sabit" yang diberikan pemilik ternak kepada penggadu (Harsita dan Amam 2021).

Sapi-sapi dengan sistem pemeliharaan tradisional, dimana peternak melakukan usaha tersebut sebagai usaha sampingan, umumnya mengalami hal yang sama yaitu rendah konsumsi pakan yang disebabkan keterbatasan peternak dalam menyediakan pakan. Gejala-gejala ini terjadi ketika sapi disapih, dimana sapi tidak mendapatkan tambahan pakan lagi dari induk berupa susu. Penyapihan pada peternakan tradisional umumnya dilakukan pada usia pedet satu tahun, sehingga sejak itu sapi-sapi sudah mulai kekurangan pakan, padahal seharusnya pada usia satu tahun dimana sapi sedang berada pada usia pertumbuhan, pemberian pakan harus diperhatikan baik kualitas maupun kuantitasnya sehingga pertumbuhan tidak terganggu. Kekurangan pakan sejak umur satu tahun (yearling feed syndrome) yang akan berlanjut sampai ternak dewasa akan menyebabkan rendahnya penampilan produksi seperti penambahan bobot badan dan gangguan reproduksi seperti

lambat birahi, service per conception (S/C) tinggi, dan kondisi tubuh terlihat kurus (Wiyatna *et al.* 2012).

Karakter khusus Peternakan Rakyat

Karakteristik khusus yang mengidentifikasi peternakan rakyat terdapat pada tujuan dalam berternak. Peternakan rakyat memiliki tujuan berternak hanya sebagai investasi. Hal ini bermaksud untuk menyiapkan dana cadangan jikalau suatu saat nanti dibutuhkan dan dapat dijual dengan mudah. Hal ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang industri peternakan yang sangat membutuhkan pasokan tambahan guna meningkatkan nilai produktivitas hewan ternak didalam negeri. Selain itu, minimnya lahan yang dimiliki menjadi sebuah alasan yang kuat untuk mereka memelihara beberapa ekor hewan ternak yang ditujukan sebagai tabungan dimasa depan. Selain itu, individual menjadi salah satu karakteristik yang dapat mengidentifikasi peternakan rakyat. Pada umumnya, peternak rakyat hanya di perkasai oleh satu keluarga yang ingin memelihara ternak di perkarangan belakang rumahnya.

Tidak adanya lembaga yang berlaku untuk mengkoordinir peternak kecil membuat para peternak bingung untuk melakukan sebuah kerja sama antar penggiat usaha ternak lainnya. Karakter individu terdiri dari beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu umur, tingkat pendidikan, pengalaman beternak, jumlah tanggungan keluarga, jumlah kepemilikan ternak. Peternak yang memiliki usia muda tentunya memiliki motivasi yang lebih tinggi dalam mengembangkan usaha yang di tekuni dibandingkan dengan peternak yang sudah lanjut usia.

Permasalahan dan Solusi pada Peternakan Rakyat

Usaha ternak sapi potong skala rumah tangga merupakan penyumbang terbesar populasi ternak sapi potong di Indonesia dan memberikan kontribusi sebesar 6,8% terhadap total pendapatan rumah tangga peternak. Ironisnya, kontribusi tersebut tidak diimbangi dengan tujuan peternak dalam menjalankan usaha ternaknya. Usaha ternak yang dijalankan bukan semata-mata orientasi bisnis, melainkan sebagai tabungan (saving), sehingga menurunkan motivasi peternak dalam menjalankan usaha ternaknya sebagai dampak akibat dari bukan sebagai mata pencaharian utama. Produktivitas sapi potong dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kompetensi teknis, khususnya dalam mengelola pemasaran dan input. Kompetensi ini dapat

ditingkatkan dengan cara meningkatkan kebutuhan berprestasi dan partisipasi aktif peternak dalam mengikuti penyuluhan/pelatihan, misalnya melalui penghargaan (Harsita P.A 2019).

Disamping itu ada beberapa permasalahan yaitu mahal nya biaya pakan, rendahnya produktivitas ternak dan belum efektifnya manajemen pengelolaan kelompok. Perkembangan peternakan sapi di Indonesia secara umum masih sangat memprihatinkan. Sebagian besar produksi daging sapi di Indonesia hampir seluruhnya diperoleh dari peternakan rakyat (78%). Sisanya dari impor, sekitar 5 % berupa daging sapi dan 17% ternak hidup (Saleh *et al.* 2014).

Partisipasi sosial dengan kontak sesama peternak, kontak dengan penyuluh, kontak dengan media massa dan kontak dengan kelompok memiliki hubungan yang kuat terhadap perilaku komunikasi peternak dalam menerapkan wirausaha ternak. Membentuk kelembagaan yaitu keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar. Suatu lembaga dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia sehingga lembaga mempunyai fungsi. Selain itu, lembaga mempunyai konsep yang berpadu dengan struktur.

3.2. Pembibitan Sistem Kemitraan

Dasar Hukum

Kemitraan dalam industri peternakan telah diatur sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang menyatakan bahwasanya :

1. Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan untuk penyelenggaraan kemitraan yang sehat dan mencegah terjadinya eksploitasi peternak.

Adapun Salah satu strategi mewujudkan hal itu adalah melalui pengembangan kemitraan usaha peternakan agar lebih efisien dan berdaya saing. Hal ini mengingat usaha peternakan didominasi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

sebagai kegiatan ekonomi rakyat. Untuk itu telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/ PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Dengan Permentan tersebut pelakukemitraan mendapatkan perlindungan berdasarkan norma ekonomi yang lazim berlaku, terbentuk keterkaitan usaha yang saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Sistem Kemitraan

Pola kemitraan antara peternak dengan industri dapat dijelaskan sebagai suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan menjalin kerjasama antara peternak kecil/*plasma*, dan industri besar/perusahaan besar/inti dengan tujuan membantu peternakan kecil meningkatkan kesejahteraannya. Selanjutnya, pola kemitraan ini dikembangkan melalui Keppres No. 22/1990 serta SK Mentan No. 172/Kpts?TN.330/1996, sebagai pendorong tumbuhnya inovasi pengembangan agribisnis di Indonesia, ditandai dengan peternak yang telah bersikap komersial dalam menerapkan unsur teknologi Sapta Usaha Ternak serta konsep sistem agribisnis (Budiarta 2017).

Karakteristik Khusus

Karakteristik dan peran dari masing-masing pihak sebagai berikut :

- ❖ Perusahaan Peternakan/Perusahaan dibidang lain
 - a. berperan memasarkan, menyediakan lokasi atau menerima pasokan.
 - b. menetapkan standar mutu dan keamanan produk yang diperlukan.
- ❖ Peternak
 - a. memproduksi dan memasok produk yang sesuai dengan standar mutu yang diperlukan Perusahaan Peternakan/Perusahaan di bidang lain.
 - b. mengelola atau memanfaatkan lokasi yang telah disediakan oleh PerusahaanPeternakan/Perusahaan dibidang lain.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang muncul terutama terkait pengembangan kemitraan usaha peternakan sapi, antara lain kurang optimalnya koordinasi antara sektoral dalam hal ini antara perusahaan sebagai *stakeholders* terkait baik dari Pemerintah melalui dinas terkait dengan pihak-pihak lain (swasta, asosiasi, UMKM, dan lain-lain), sehingga kemitraan strategis yang semestinya bisa dilaksanakan dengan baik antar *stakeholders* terkait tersebut kurang berjalan optimal. Kondisi yang diperlukan dalam

meningkatkan peran stakeholders dalam pengembangan kemitraan usaha peternakan Sapi, antara lain adanya komitmen bersama kelompok, sentra UMKM dan *stakeholders*, ketersediaan produk/produk olahan dan bahan baku yang memadai, akses pasar yang mudah, ketersediaan teknologi produksi yang memadai, manajemen usaha yang baik, ketersediaan modal yang memadai, standarisasi produk, infrastruktur sarana dan prasarana distribusi yang memadai. Selain itu juga adanya peningkatan skill SDM UMKM, adanya lembaga intermediasi, adanya forum komunikasi bersama, adanya regulasi yang mendukung UMKM, adanya fasilitas penunjang (teknologi, layanan, kredit), infrastruktur dukungan dana operasional, dan lain-lain (Adi 2010).

3.3. Pembibitan Bersama BUMN

Dasar Hukum

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selain mempunyai fungsi utama mencari keuntungan juga mempunyai tugas memperhatikan persoalan sosial. Dalam Pasal 88 ayat (1) UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Perwujudan dari pasal ini dilaksanakan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dimana ketentuan terakhir diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN. Dalam pasal 9 ayat (3) dijelaskan bahwa dana Program BL disalurkan dalam bentuk bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan, atau bantuan peralatan usaha.

Selain program kemitraan dan bina lingkungan, beberapa perusahaan BUMN juga memberikan bantuan dengan mengucurkan sejumlah bantuan pinjaman dana kepada beberapa mitra peternak. Salah satu contohnya adalah PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) yang pada tahun 2021 mengucurkan dana sebesar Rp 8,52 miliar untuk disalurkan kepada 710 orang mitra peternak penggemukan sapi potong yang berasal dari 15 Unit Kebun PTPN XII yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi, Jember, Bondowoso, dan Kediri. Dana tersebut merupakan dana pinjaman bergulir dari perusahaan yang disalurkan guna membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Sistem Kemitraan

Penguatan skala ekonomi dan kelembagaan peternak, pemerintah juga mengupayakan serangkaian kebijakan seperti:

- a) Mendorong pola pemeliharaan sapi dari perorangan ke arah kelompok dengan pola perkandangan koloni sehingga memenuhi skala ekonomi;
- b) Mendorong dan melakukan pendampingan kepada peternak untuk berkorporasi melalui kegiatan pengembangan kawasan peternakan dan pendampingan petugas;
- c) Pengembangan pola integrasi ternak tanaman, misalnya integrasi sapi-sawit, jagung sawit;
- d) Pengembangan padang penggembalaan: optimalisasi lahan ex-tambang dan kawasan padang penggembalaan di Indonesia Timur;
- e) Fasilitasi Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS),
- f) penyediaan skim kredit : KUR mikro, KUR Kecil dan KUR Khusus Peternakan Rakyat dengan bunga 7% dan grace periode sesuai karakteristik usaha,
- g) Pengembangan pola pembiayaan usaha peternakan dengan kemitraan.

Pola kemitraan juga telah dilakukan dengan melibatkan investor yang berperan sebagai avalis atau sebagai off-taker diantara kelompok/gapoknak dan perbankan ataupun lembaga pembiayaan lain non-perbankan. Investor yg dimaksud tersebut adalah perusahaan swasta atau Koperasi/Badan Usaha Milik Petani. Sumber pembiayaan usaha antara lain berasal dari perbankan dan program Pengembangan Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari beberapa BUMN. Pola kemitraan seperti ini yang sudah berjalan antara lain di Kabupaten Wonogiri, yaitu antara Perusahaan Peternakan Widodo Makmur Perkasa, kelompok peternak yang tergabung dalam BUMP PT Pengayom Tani Sejadid dan Bank Sinar Mas.

Karakter Khusus

Pola kemitraan perlu dikembangkan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan baik dengan koperasi, swasta maupun dengan Badan Usaha Milik Negara. Adanya lahan yang luas serta didukung oleh kondisi tanah yang subur merupakan faktor pendukung dalam pengembangan serta peningkatan produksi di sektor pertanian/peternakan. Minimnya ketersediaan lahan peternakan merupakan eksese dari perkembangan kegiatan usaha perkebunan, khususnya perusahaan-perusahaan perkebunan baik itu perkebunan swasta maupun perkebunan milik pemerintah (BUMN).

Perkembangan kegiatan usaha perkebunan yang ada di daerah Sumatera Utara merupakan salah satu potensi dalam pengembangan usaha peternakan daging sapi. Hal tersebut karena perkebunan yang ada di daerah Sumatera Utara sangat luas sehingga berpotensi untuk pemeliharaan ternak khususnya ternak sapi potong.

Pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berupa kerjasama dibidang permodalan atau pembiayaan, pengolahan, lahan, pemasaran, pendistribusian, dan rantai pasok. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil yang disebut Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan lahan milik BUMN. Program kemitraan merupakan kerja sama usaha antara usaha kecil dan menengah atau dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan (Ariswidodo 2017). Pola kemitraan ini terdiri atas inti dan juga plasma.

1. Inti

Perusahaan Peternakan skala besar atau menengah/perusahaan, penyedia input dan fasilitas sarana produksi, pembeli hasil produksi plasma pada tingkat harga yang telah disepakati, memberikan pembinaan dan pengembangan dalam hal: bimbingan teknis produksi, manajemen usaha, pembiayaan, pemasaran, penjaminan, pemberian informasi, perolehan dan penguasaan peningkatan teknologi yang diperlukan, dan memberikan bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas plasma.

2. Plasma

Peternak, kelompok peternak, gabungan kelompok peternak ataupun koperasi peternakan, melakukan proses produksi atau memproses input yang tersedia menjadi produk yang dibutuhkan perusahaan inti, menjual atau memasok hasil produksinya kepada perusahaan inti pada tingkat harga dan kualitas yang telah disepakati.

Permasalahan dan Solusi

Dalam menjalin kerjasama antara peternak dengan BUMN, permasalahan yang seringkali dialami adalah masalah penentuan harga. Peternak harus mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, di mana harga tersebut tidak selamanya dapat menguntungkan peternak. Tidak jarang peternak malah menjadi rugi. Solusi yang dapat dilakukan adalah membuat kesepakatan dan perjanjian yang jelas antar kedua belah

pihak agar kedepannya tidak ada yang merasa dirugikan. Contoh masalah lain yang terjadi adalah perusahaan yang terkesan berbuat seenaknya seperti menanami pohon di dalam lahan penggembalaan sehingga mengurangi kapasitas lahan dan mengganggu proses pemeliharaan. Solusi yang dapat dilakukan jika masalah tersebut telah terjadi adalah dengan proses koordinasi antar kedua belah pihak.

IV. KESIMPULAN

Sistem pembibitan peternakan di Indonesia telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari usaha mandiri peternak rakyat, kemitraan dengan perusahaan swasta hingga kemitraan dengan BUMN. Seluruh kegiatan ini telah memiliki payung hukum yang jelas serta telah memiliki beberapa spesifitas karakteristik yang dapat dikembangkan sebagai solusi dalam pembibitan sapi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi RK. 2010. Peran jejaring agribisnis dalam membangun kemitraan agribisnis (studi pada pengembangan klaster usaha peternakan sapi potong di Kabupaten Sukoharjo. *J. Universitas Sebelas Maret*. 3(3): 6-9.
- Ariswidodo S. 2017. Kajian hukum terhadap hubungan kemitraan antara peternak sapi dengan perkebunan kelapa sawit (studi di kantor PTPN IV perkebunan Ajamu I-Rantau Prapat).
- Budiartha IW. 2017. Industri peternakan rakyat (Innayat) [tesis]. Denpasar (ID) : Fakultas Peternakan, Universitas Udayana Denpasar.
- [Direktorat PPHNak] Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. 2019. Panduan Kemitraan Usaha Peternakan Edisi Tahun 2019.
- Fuah AM, Sumantri C, Astuti DA, Permana IG, Abdullah L, Muladno. 2021. *Diktat Peternakan Inovatif*. Bogor : IPB Press.
- Listiani R, Mustofa MS, Utami CSM. 2013. Fungsi program kemitraan dan bina lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IX Kebun Merbuh dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. *Solidarity: Journal of Education, Society, and Culture*. 2(2): 87-94.
- Munadi LOM, Hidayat, Sahaba LO, Inal. 2021. Pola dan sistem pemeliharaan ternak sapi bali di kabupaten Muna. *Jurnal Ilmiah Penyuluhan dan Pengembangan Masyarakat* . 1(2): 83-87.
- Mutiah A, Abdullah A, Nurlaelah S. 2018. Identifikasi peranan kelompok sebagai wahana kerja sama pada kelompok peternak sapi potong pada peternakan rakyat. *Jurnal Agripet*, 18(1), 57-62.
- Pakpahan ARS. 2012. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi impor daging sapi di Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*. 1(2): 1-14.
- Putra ARS, Triatmojo A. 2018. Analisis dampak kebijakan impor daging kerbau di Indonesia melalui pendekatan manajemen rantai nilai ternak. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Peternakan*. 1(1): 1-7.
- Saleh A, Aida V, Sutisna RS. 2014. Pengembangan sistem produksi dan keamanan pangan sapi potong peranakan ongole (PO) melalui penguatan peternakan rakyat di Kabupaten Bojonegoro. Bogor (ID): IPB.
- Sasoeng A, Tilaar W, Kalangi JKJ. 2020. Potensi pengembangan ternak sapi potong rakyat di Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. *Agri-SosioEkonomi Unsrat*. 16(2): 291-300.

- Sodiq A, Budiono M. 2012. Produktivitas sapi potong pada kelompok tani ternak di pedesaan. *Jurnal Agripet*. 12(1): 28-33.
- Sodiq A, Yuwono P. 2016. Pola pengembangan dan produktivitas sapi potong program kemitraan Bina Lingkungan di Kabupaten Banyumas dan Cilacap Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Agripet*. 16(1): 56-61.
- Suardika P, Ambarawati, Sudarma IM. 2015. Efektivitas kemitraan usaha ternaksapi potong terhadap pendapatan petani-peternak di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Agribisnis*.3(2): 155-162.
- Tawaf R. 2018. Analisis usaha pembiakan sapi potong pola kemitraan antara korporasi dengan peternak rakyat. *Sosiohumaniora-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*. 20(1): 45-56.
- Widayati TW. 2012. Perhitungan kebutuhan jumlah induk sapi untuk mendapatkan keuntungan usaha yang maksimal menggunakan metode lagrangian di Kabupaten Manokwari. *Jurnal Ilmu Peternakan*. 7(1): 20 – 25.
- Wiyatma MF, Gurnadi E, Mudikdjo K. 2012. Produktivitas sapi peranakan ongole pada peternakan rakyat di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ilmu Ternak*. 12(2): 22-25.